

DOKUMEN
RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN WATANG PULU



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Pulu Tahun 2022. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Pulu Tahun 2022 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Watang Pulu dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Rencana Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Watang Pulu masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Uluale, 29 Juli 2021

CAMAT WATANG PULU

A. SURYA PRAJAHADINGRAT, SH, M.Si
NIP. 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Watang Pulu Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Pulu.....
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Watang Pulu	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	17
BAB III TUJUAN dan Sasaran Perangkat Daerah	18
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watang Pulu.....	19
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	20
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	20
4.2. Program Kegiatan.....	22
BAB IV PENUTUP	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2022 Kecamatan Watang Pulu yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Watang Pulu, pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Kecamatan Watang Pulu dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya pengembangan keamanan dan ketertiban umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplis tugas Camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian ditingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrembang baik ditingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja (Renja) yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang meliputi Demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Watang Pulu Tahun 2022 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, demokratis produktif, maju, aman, tertib dan budaya. Selanjutnya Rencana kerja yang telah disusun akan diimplementasikan dan merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan Kecamatan Watang Pulu untuk rentang waktu Tahun 2022

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Watang Pulu tahun 2022 antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabuoaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Watang Pulu adalah Dokumen disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan untuk menjadi acuan pembangunan baik aparatur pemerintah Kecamatan Watang Pulu dan masyarakat Kecamatan Watang Pulu yang disepakati bersama sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu Satu tahun kedepan. Renstra Kecamatan Watang Pulu juga dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Perencanaan lainnya termasuk Rencana Kerja (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Watang Pulu tahun 2022 adalah :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya Kecamatan Watang Pulu;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis. Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Watang Pulu Tahun 2022 disusun berdasarkan sistematika berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renja ini, dasar hukum. Maksud dan Tujuan, serta sistematika pembahasan.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Watang Pulu Tahun Lalu

Memuat : (1) Kajian/Review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Watang Pulu tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, (2) Analisis kinerja PD, (3) isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, (4) review terhadap rancangan awal RKPD, dan (5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Watang Pulu, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Watang Pulu.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan uraian program kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan program kerja kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2021 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, yang mencakup Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan berisikan sub kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan; dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mencakup:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan berisikan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
 - b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang berisikan sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; penyediaan peralatan rumah tangga; dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi.
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah yang berisikan sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya; dan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
 - d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan Pemerintah Daerah yang berisikan sub kegiatan

pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya; dan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang berisikan sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; penyediaan jasa pelayanan umum kantor; dan penyediaan jasa surat menyurat.
- f. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berisikan sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun 2020 dan pencapaian Renstra s/d tahun 2021 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada *(Tabel T-C.29.)*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Dalam mencapai Kinerja Pelayanan Kecamatan Watang Pulu Tahun 2022 berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Kecamatan Watang Pulu merupakan bagian Integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintahan sebagaimana diuraikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Watang Pulu berikut ini : *(Tabel T-C.30.)*

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Pulu bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan, pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *company/cooperate sosial resposipility (CSR)*, maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu di pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan

dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

4. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Lingkup analisis Kinerja pelayanan di Kecamatan Watang Pulu meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

A. Lingkungan Internal

Peluang:

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas
2. Kekuatan Hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
4. Kewenangan koordinasi ditingkat Kecamatan
5. Adanya sarana dan prasarana

Tantangan:

1. Kualitas SDM yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan ditingkat Kecamatan

B. Lingkungan Eksternal

Peluang:

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.

Tantangan:

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan Dokumen Perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pembangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja, pendanaan, dan prakiraan maju yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rencana Kerja Kecamatan Watang Pulu berdasarkan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah se Kabupaten Sidenreng Rappang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Watang Pulu.

Untuk lebih jelasnya mengenai review rancangan awal RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada *Tabel T-C.31*.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Watang Pulu tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi wewenang Kecamatan dan Peningkatan kualitas aparaturnya.
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi ;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah. Telaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Watang Pulu, maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengembalian delegasi.

Usulan program dan kegiatan di Kecamatan Watang Pulu tidak ada, terlampir pada tabel *T-C.32*

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional Lima Tahun (jangka menengah) merupakan bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam pelaksanaannya dilakukan dua tahapan yaitu, APBD awal dan APBD perubahan. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus selalu mengacu pada program dan Kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Ada prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 adalah:

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya SaingPenurunan kesenjangan social ekonomi.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini sejalan dengan sasaran dan program Kecamatan Watang Pulu yang bertujuan untuk meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Watang Pulu dan meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Watang Pulu

Tujuan Rencana Kerja adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan renja Kecamatan Watang Pulu dititik beratkan pada upaya pencapaian hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Sasaran Rencana Kerja adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Watang Pulu.
2. Meningkatnya Peranserta Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Watang Pulu dimana pada tahun 2022 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai B dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan nilai 45%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Watang Pulu Tahun 2022 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan
 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

C. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

4.2. Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR
1	<p>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>➤ Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 	<p>CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</p> <p>➤ Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan 2. Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan
2	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</p> <p>➤ Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 	<p>TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p> <p>➤ Cakupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Kelurahan yang mendapat pembangunan sarana dan prasarana 2. Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan
3	<p>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>➤ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>	<p>CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</p> <p>➤ Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 3. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi 2. Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi 3. Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi
4	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ➤ Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	<p>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian gaji dan tunjangan ASN ➤ Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan 3. Waktu penyediaan peralatan rumah tangga 4. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

	<p>➤ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <p>➤ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan <p>➤ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	<p>➤ Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi 2. Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan <p>➤ Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan 2. Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan <p>➤ Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 2. Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor 3. Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan
--	---	--

	<p>➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>	<p>➤ Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p>1. Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p>
--	---	---

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing Desa/Kelurahan se Kecamatan Watang Pulu dan dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan sebagai berikut :

(Tabel T-C.33)

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Watang Pulu dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Watang Pulu.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Watang Pulu. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Watang Pulu ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi pelaksanaan rencana Kerja (Renja) tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekwensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak

untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat terwujud, untuk mencapai tujuan akhir bersama. Amin.

..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen								
..01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	300	300	
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian gaji dan tunjangan ASN	70	Bulan	14	14	12	86	14	14	14	
..01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen		100			100	100	12	
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Bulan					12			
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	553	Buah	50	100	25	25	101	176	32	
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	362	Unit		100	10	10	54	64	18	
..01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga		Bulan					12			
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	2,013	Kali	20	285	10	4	448	478	24	
..01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		100			100	100	525	
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	47	Unit	6	7	2	29	11	19	40	
..01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	Bulan	12	12	12	100	12	12	100	
..01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen		100			100		2	
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	1	Unit					1			
..01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2	Unit	8				-			
..01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	Persen		100			100		12	
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60	Bulan	12	12	12	100	12	36	60	
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	1,710	Lembar	400	450	100	22	210	710	42	
..01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	Persen		100			100			
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20	Dokumen	2	5	5	100		7	35	

CAMAT WATANG PULU

A. SURYA PRAJA HADINGRAT, SH, M.Si

Pangkat : Penata TK I

NIP : 19850419 200312 1 006

TABEL TC-30
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
KECAMATAN WATANG PULU SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

1	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	Satuan	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		Catatan
					2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01														
7.01.02	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			0	0	0	0	100	100					
7.01.02.2.04	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				0	0	100	100	100					
7.01.02.2.04.02	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan			Urusan	-	-	-	10	10					
7.01.02.2.04.03	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan			Urusan	-	-	-	1	1					
7.01.03	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT							45%	47%					
7.01.03.2.02	Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan							45%	47%					
7.01.03.2.02.02	Cakupan Kelurahan yang mendapat pembangunan sarana dan prasarana			Kelurahan		5		5	5					

7.01. 03.2. 02.03	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan			Kegiatan		50		1	1				
7.01. 06	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Persen				100	100				
7.01. 06.2. 01	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Persen				100	100				
7.01. 06.2. 01.03	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi			Desa				5	5				
7.01. 06.2. 01.07	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi			Desa				5	5				
7.01. 06.2. 01.11	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi			Desa				5	5				
..01	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Persen	100	100	100	100	100				
..01. 2.02	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persen	100	100	100	100	100			100	100
..01. 2.02. 01	Pemberian gaji dan tunjangan ASN			Bulan	14	14	14	14	14	12	3	12	12
..01. 2.06	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persen	100	100	100	100	100			100	100
..01. 2.06. 05	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Bulan			12	12	12		0	12	12
..01. 2.06. 01	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan			Buah	100	100	101	112	112	25	0	101	101
..01. 2.06. 02	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			Unit	100	100	54	29	29	10	0	54	54
..01. 2.06. 03	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga			Bulan			12	12	12		0	12	12
..01. 2.06. 09	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi			Kali	230	285	448	340	340	10	0	500	550

.01. 2.09	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persen	100	100	100	100	100			100	100	
.01.2.09.09	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi			Unit	7	7	11	10	10	2	0	11	11	
.01. 2.09.01	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			Bulan	12	12	12	12	12	12	0	12	12	
.01. 2.08	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			Persen	100	100	100	100	100			100	100	
.01. 2.08.02	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			Bulan	12	12	12	12	12	12	0	12	12	
.01. 2.08.04	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor			Bulan	100	100	12	12	12	12	0	12	12	
.01. 2.08.01	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan			Lembar	400	450	210	400	350	100	0	300	350	
.01.2.01	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Persen	100	100	100	100	100			100	100	
.01.2.01.06	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Dokumen	5	5		5	5	5	0	5	5	

CAMAT WATANG PULU

A. SURYA PRAJA HADINGRAT, SH, M.Si

Pangkat : Penata TK I

NIP : 19850419 200312 1 006

Tabel TC-31
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

1	RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS SKPD						CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome),	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome),	TARGET CAPAIAN	SATUAN	PAGU INDIKATOR	
7	UNSUR KEWILAYAHAN						UNSUR KEWILAYAHAN						
7.01	KECAMATAN						KECAMATAN						5,712,509,710
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Watang Pulu	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		3,000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Watang Pulu	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%		3,000,000	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Watang Pulu	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		3,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Watang Pulu	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%		3,000,000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Watang Pulu	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	1,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Watang Pulu	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urusan	1,500,000	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Watang Pulu	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	1,500,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Watang Pulu	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urusan	1,500,000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Watang Pulu	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45%		363,350,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Watang Pulu	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	45%		363,350,000	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Watang Pulu	Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	45%		1,500,000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Watang Pulu	Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	45%		1,500,000	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Watang Pulu	Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Desa	1,500,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Watang Pulu	Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Desa	1,500,000	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	45%		361,850,000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan	45%		361,850,000	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	Orang	269,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	50	Orang	269,000,000	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117	Orang	91,350,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117	Orang	91,350,000	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Cakupan Evaluasi Kelurahan	5	Kelurahan	1,500,000	Evaluasi Kelurahan	Kec. Watang Pulu	Cakupan Evaluasi Kelurahan	5	Kelurahan	1,500,000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Watang Pulu	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%		4,500,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Watang Pulu	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%		4,500,000	

7.01. 06.2. 01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Pulu	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		4,500,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Watang Pulu	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%		4,500,000	
7.01. 06.2. 01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Watang Pulu	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Watang Pulu	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000	
7.01. 06.2. 01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Watang Pulu	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Watang Pulu	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000	

7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Watang Pulu	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Watang Pulu	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000	
	X	Kec. Watang Pulu					X	Kec. Watang Pulu					
	XXX	Kec. Watang Pulu					XXX	Kec. Watang Pulu					
.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Watang Pulu	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		5,341,659,710	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Watang Pulu	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%		5,341,659,710	
.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		28,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		28,000,000	
.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Watang Pulu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen	28,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Watang Pulu	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen	28,000,000	
.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		3,706,610,110	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		3,706,610,110	
.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Watang Pulu	Pemberian gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	3,706,610,110	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Watang Pulu	Pemberian gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	3,706,610,110	
.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		242,356,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		242,356,600	
.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Watang Pulu	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	112	Buah	5,550,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Watang Pulu	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	112	Buah	5,550,000	
.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Watang Pulu	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29	Unit	129,827,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Watang Pulu	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29	Unit	129,827,000	
.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	3,500,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	3,500,000	
.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	10,609,600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	10,609,600	
.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Watang Pulu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	340	Kali	92,870,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Watang Pulu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	340	Kali	92,870,000	
.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		1,110,801,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%		1,110,801,000	

.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Watang Pulu	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	400	Lembar	5,570,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Watang Pulu	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	400	Lembar	5,570,000	
.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	48,528,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	48,528,000	
.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	1,056,703,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	1,056,703,000	
.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		253,892,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Watang Pulu	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		253,892,000	
.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	Bulan	45,054,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Watang Pulu	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	Bulan	45,054,000	
.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Watang Pulu	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	10	Unit	208,838,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Watang Pulu	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	10	Unit	208,838,000	

CAMAT WATANG PULU

A. SURYA PRAJA HADINGRAT, SH, M.Si

Pangkat : Penata TK I

NIP : 19850419 200312 1 006

Tabel TC-32
USULAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN WATANG PULU

Kode	PROGRAM / KEGIATAN	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) / kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan Penting
	JUMLAH						

CAMAT WATANG PULU

A. SURYA PRAJA HADINGRAT, SH, M.Si

Pangkat : Penata TK I

NIP : 19850419 200312 1 006

Tabel TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN WATANG PULU

1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Lokasi	RENCANA TAHUN 2022			Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN				5,712,509,710					5,769,634,806
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	3,000,000	DANA ALOKASI UMUM		DANA ALOKASI UMUM		3,030,000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3,000,000			100%		3,030,000
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan		10	Urusan	1,500,000		10	Urusan	1,515,000
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan		1	Urusan	1,500,000		1	Urusan	1,515,000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		45%		363,350,000		47%		366,983,500
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Ckupan Kegiatann Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakan		45%		1,500,000		47%		1,515,000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		5	Desa	1,500,000		5	Desa	1,515,000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		45%		361,850,000		47%		365,468,500
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		50	Orang	269,000,000		50	Orang	271,690,000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		117	Orang	91,350,000		117	Orang	92,263,500

7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Cakupan Evaluasi Kelurahan	5	Kelurahan	1,500,000			5	Kelurahan	1,515,000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			4,500,000			100%		4,545,000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			4,500,000			100%		4,545,000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000			5	Desa	1,515,000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000			5	Desa	1,515,000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	5	Desa	1,500,000			5	Desa	1,515,000
	X									
	XXX									
.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota			5,341,659,710			100 Persen		5,395,076,306
.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			28,000,000			100%		28,280,000
.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Dokumen	28,000,000			5	Dokumen	28,280,000
.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3,706,610,110			100 Persen		3,743,676,210
.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	3,706,610,110			14	Bulan	3,743,676,210
.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			242,356,600			100		244,780,166
.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	112	Buah	5,550,000			112	Buah	5,605,500
.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	29	Unit	129,827,000			29	Unit	131,125,270
.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan peralatan rumah tangga	12	Bulan	3,500,000			12	Bulan	3,535,000
.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	10,609,600			12	Bulan	10,715,696
.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	340	Kali	92,870,000			340	Kali	93,798,700
.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			1,110,801,000			100		1,121,909,010
.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	400	Lembar	5,570,000			400	Lembar	5,625,700
.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12	Bulan	48,528,000			12	Bulan	49,013,280
.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	1,056,703,000			12	Bulan	1,067,270,030

.01. 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%		253,892,000			100		256,430,920
.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan		12	Bulan	45,054,000			12	Bulan	45,504,540
.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi		10	Unit	208,838,000			10	Unit	210,926,380

CAMAT WATANG PULU

A. SURYA PRAJA HADINGRAT, SH, M.Si

Pangkat : Penata TK I

NIP : 19850419 200312 1 006